

KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI KERAJAAN LUAT MARANCAR PADA MASA PENDUDUKAN BELANDA DAN JEPANG (1930-1942)

Oleh:

Erwin Siregar¹⁾, Salman Alparis Sormin²⁾

¹Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

²Universitas Musamus Merauke

¹regarewin07@gmail.com

²ariqinhafizd@gmail.com

Abstract

Problem on this research was funtion and king's role vanishing in society since paderi invention, Duch and Japan colonization. It brouht a changing to traditional government system that has been appropriate to costum and Batak Angkola's culture. This research was to know that traditional leadhershship of Angkola society in Luat Marancar Kingdom before Dutch was coming. Then, it was also to know impact of Dutch and Japan colonization to traditional leadership of Angkola society in Luat Marancar Kingdom. And, it was done in order to know the difference between traditional leadership in Dutch and Japan period in Angkola society in Luat Marancar Kingdom. This research used history method by using primary and secondart sources. Primary sources in this research were kings' heritance notes who have become a leader in Luat Marancar kingdom, kings' generation who were still alive till now, and costum figure on that society who were pretened knowing the story of Marancar kingdom. For secondary sources, there were apparatuses regency government, old figures and documents or books that were related to this research. Besides, this research also used interview with some discipline approaches; anthropology, sociology as needed in order to enrich this research. The findings of this research cosited of traditional leadership of Marancar Luat society before effect of Dutch was coming, leader or kings' role and function as leader and costum leader. However, after Dutch Governement came to Luat Marancar, there was a significant changing of leadership concept in Luat Marancar which are kings' role and fuction changing into Dutch colonization servants in taking tax and controlling hard corvee. While when Japan came, there was no significant changing in government system in Luat Marancar Kingdom.

Keywords: Leadership, Traditional, Dutchand.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang memiliki beraneka ragam suku bangsa (etnis), dan keseluruhan etnis tersebut memiliki latar belakang sejarah yang menarik untuk dikaji, tanpa terkecuali keberadaan suku di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu suku yang terdapat di Sumatera Utara adalah suku Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, disamping itu ada juga suku Batak lainnya seperti : 1) suku Batak Mandailing, 2) Batak Toba, 3) Batak Simalungun, 4) Batak Pak-Pak Dairi, 5) Batak Karo (Simanjuntak, 2002:1). Khususnya Tapanuli Bagian Selatan jauh sebelum masuknya pengaruh asing, sudah terdapat banyak komunitas kecil yang disebut sebagai huta. Setiap huta (*village*) dipimpin oleh seorang raja dengan gelar *Raja Pamusuk*. Setiap huta ini mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang secara tradisional berdiri secara otonom. Sejumlah huta yang berdekatan secara teritorial dan terkait hubungan darah (*genealogis*) membentuk sebuah kawasan adat yang disebut *Luh* yang dipimpin oleh *Raja Panusunan Bulung*.

Dalam menjalankan pemerintahan *huta* dan *Luh* para *Raja Pamusuk* dan *Raja Panusunan*

Bulung mengacu pada sistem adat Batak yang mengatur sedemikian rupa dengan berlandaskan prinsip kekerabatan "*dalihan na tolu*". *Raja Panusunan Bulung* dipilih dari antara *Raja Pamusuk* yang terdapat dalam *Luh*, khususnya dari pihak turunan "*sipungka huta*" (yang membuka huta) di dalam *Luh* yang bersangkutan. *Raja Panusunan Bulung* ini selain sebagai kepala pemerintahan, juga sekaligus menjadi pengetua adat atau Raja Adat yang memimpin berbagai kegiatan seperti keagamaan, social hingga kegiatan ekonomi di seputar kawasan *Luh* yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sekalipun sistem pemerintahan *Luh* yang terbentuk mirip sistem oligarki (dari turunan *si punga huta*), namun sesungguhnya sistem demokrasi yang lebih berperan yang direpsentasikan dengan adanya *Lembaga Hatobangon* (Lembaga Tetua Adat) yang fungsinya mendampingi *Raja Panusunan Bulung* dalam memimpin *Luh*. Ini berarti setiap warga dari komunitas atau *huta* terwakili di dalam musyawarah *Luh*. Mendahulukan *sipungka huta* yang juga menjadi *Raja Panusunan Bulung* sudah sepantasnya untuk didudukkan sebagai pemimpin *Luh*, namun keputusannya terkendali oleh peran *lembaga hatobangon*.

Suatu komunitas kecil dikatakan sebagai huta jika komunitas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri hingga dapat berdiri sendiri, dan huta ini diresmikan menjadi *Bona Bulu*. Komunitas kecil ini berawal dari tradisi membuka huta di dalam kawasan *Luhut* yang dalam perjalanannya komunitas kecil tersebut lalu berkembang menjadi *Bona Bulu*. Sebuah *huta* yang dapat diresmikan menjadi *Bona Bulu*, manakala telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) terdapat penduduk sekurang-kurangnya tiga keluarga 'dalihan na tolu' yang terdiri dari kahanggi (bersaudara), anak boru (besan dari pihak perempuan), dan mora (besan dari pihak laki-laki); (2) tersedia lahan yang cukup untuk pertanian (tanaman pangan, peternakan atau perikanan); (3) ada pemerintahan yang mampu menyelenggarakan tertib umum dan dapat meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan hidup terhadap semua keluarga di dalam komunitasnya; (4) mendapat pengakuan atas keberadaan calon huta oleh seluruh huta yang sudah ada disekitarnya di dalam Luhut.

Konsep kepemimpinan raja merupakan bagian adat budaya "*Dalihan Na Tolu*" bagi laki-laki di Tapanuli Selatan yang masih dapat kita jumpai hingga hari ini. Raja merupakan sebutan untuk sebutan untuk menyatakan keberadaan pimpinan suatu masyarakat pada wilayah *huta*, sedang sebutan "*Raja*" adalah gelar yang diberikan oleh masyarakatnya kepada seorang laki-laki yang telah menikah di daerah ini, oleh karenanya kuat dugaan penulis bahwa telah terjadi akulturasi budaya Batak dan Minangkabau di Tapanuli Selatan.

Keberadaan Raja-raja adat dalam budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan sosok pemimpin adat yang melakoni setiap upacara-upacara adat seputar kehidupan (*life cycle ceremonies*) di tengah-tengah masyarakatnya, yang terdiri dari upacara *Siluluton* dan upacara *Siriaon*. *Siluluton* artinya peristiwa yang di alami seseorang dalam bentuk kesedihan (duka cita) seperti kematian, dan hal-hal yang bersifat musibah. Sedangkan *Siriaon* artinya peristiwa yang dialami seseorang atau keluarga dalam bentuk kegembiraan (suka cita) seperti perkawinan, kelahiran, memasuki rumah baru dan lain sebagainya. Bentuk peristiwa ini dalam kehidupan orang Tapanuli Selatan melibatkan anggota kerabat dengan upacara adat dan agama. Disamping fungsi Raja untuk memimpin upacara-upacara di seputar lingkaran kehidupan masyarakat di bawah teritorial kekuasaannya, Raja juga menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi. Hal ini diselesaikan dalam rapat adat, dimana rapat adat dilaksanakan untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus pengadilan adat. Pemerintahan tradisional di Tapanuli Selatan berbentuk kerajaan yang bersifat Oligarki.

Raja sebagai pemimpin eksekutif dibantu oleh anak boru dan didampingi oleh mora sebagai penasehat. *Dalihan Na-Tolu* sebagai badan legislatif

terdiri dari *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* bersama dengan *hatobangon*, yaitu para sesepuh dan cerdik cendikia yang arif dan bijaksana. Mereka ini terdiri dari wakil marga-marga yang berdiam di huta yang bersangkutan disebut dengan pimpinan Ripe-Ripe. Selain mewakili Ripe para pemuka agama tergolong dalam hatobangon. Pada abad yang lalu masyarakat Angkola dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu: *namora-mora* (golongan bangsawan), *halak najaji* (orang banyak), *hatoban* (golongan budak). Namun sejak masuknya Belanda ke tanah Angkola pada tahun 1876 secara resmi menghapuskan sistem perbudakan di Tapanuli Selatan

Secara tradisional huta dipimpin oleh seorang Raja yaitu *Raja Pamusuk*. *Raja Pamusuk* pada *huta* tersebut merupakan keturunan dari marga orang yang pertama membuka wilayah tersebut menjadi pemukiman. Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan huta sebagai sebuah pemerintahan, melemah karena pengaruh Islam. Islam masuk ke wilayah Angkola sejak tahun 1816. Pada waktu itu terjadilah pengislaman pada masyarakat Angkola, yang menurut sebelumnya Animisme (Sipelebegu).

Karena beradab dibawah pengaruh Animisme, tentu saja adat istiadat orang angkolasebelum ditaklukkan oleh kaum Paderi banyak berkaitan dengan kepercayaan itu. Keadaan adat istiadat yang demikian, tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh kaum Paderi dari Sumatera Barat. Oleh karena itu dalam mengembangkan ajaran agama Islam, kaum Paderi telah menghapuskan berbagai kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, maka terjadilah berbagai perubahan besar dalam adat istiadat masyarakat Angkola dibawah ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh kaum Paderi.

Namun demikian, Pemerintah Paderi masih memberikan toleransi pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sejauh tidak merubah aqidah agama Islam. Sejak berkuasanya kaum Paderi di wilayah angkola, atau pemerintahan tradisional yang ada setelah kaum Paderi menguasai daerah ini, dan agama Islam yang telah dianut oleh masyarakat, telah merubah struktur dan sistem pemerintahan yang ada. Sebelum masuknya pengaruh belanda raja "*Panusunan*" *Bulung*" yang membawahi beberapa "*huta*", hanya mempunyai peranan tertentu saja, yaitu dalam masalah adat istiadat. Sedangkan raja "*Pamusuk*" mempunyai peranan yang lebih dominan dalam setiap "*huta*" yang dikuasainya. Akan tetapi setelah wilayah ini dikuasai oleh kaum Paderi, atau agama Islam lebih eksis dari pada adat istiadat, maka sistem dan struktur pemerintahan itu mengalami perubahan. Raja "*Panusunan Bulung*" yang secara formalitas menguasai wilayah yang terdiri dari beberapa "*huta*", atau wilayah kenegerian, dirubah sebutannya menjadi kepala "*Kuria*". Istilah "*Kuria*" ini berasal dari bahasa Arab "*Qoriah*". Yang artinya adalah wilayah.

Sedangkan penguasanya disebut sebagai “khadi”, yang dapat juga berarti “hakim”. Dengan demikian seorang raja “Panusunan Bulung ” yang mengepalai sebuah “Kuria”, Keika nama itu sudah berubah menjadi “Khadi”, dan kekuasaannya juga bertambah luas para “Khadi setiap “Kuria”, bukan saja berkuasa dibidang keagamaan, melainkan juga dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Jelasnya kalau sebelumnya tokoh-tokoh tradisional pada masa paderi memerintah berdasar pada syariat (norma-norma menurut ajaran agama Islam). Hal ini terus berlanjut sampai kolonial Belanda menguasai Tanah Angkola. Kekuasaan Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan RI. Keberadaan *huta* yang dulu Raja-nya memiliki kekuasaan penuh lambat laun kekuasaan tersebut tidak memiliki apa-apa kecuali sebagai Raja adat pada masyarakatnya. Sementara dalam struktur pemerintahan resmi keberadaan Raja dalam sebuah *huta* masuk dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD), bekerja sama dengan kepala desa untuk memajukan *huta* mereka. Razzaq (2001:121) masa pendudukan Belanda di Tapanuli para Raja, merupakan perpanjangan tangan Belanda, dengan tujuan utama untuk mengutip pajak dari rakyat dan menyerahkan masyarakat untuk melakukan kerja paksa (*rodi*) yang sangat menderitakan masyarakat Angkola.

Berbeda dengan pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang tidak ada kelas sosial seperti yang diciptakan oleh Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua golongan diajak untuk ikut dalam membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, sebagaimana yang di kemukakan Reid (2010:78) inovasi yang sungguh luar biasa dari pemerintahan Jepang adalah diajaknya semua sumber kepemimpinan yang ada untuk masuk ke dalam berbagai administratif, penasehat, propoganda tempat sedikit banyaknya mereka bekerja sama dengan Jepang. Hingga saat ini fenomena raja sebagai pemimpin dalam masyarakat di daerah Angkola masih mengundangi kontradiksi. Sebab adat budaya masyarakat Angkola menjunjung tinggi kepemimpinan raja, namun disisi lain akibat penetrasi Belanda dan Jepang terjadi kesenjangan antara kaum bangsawan (raja) dengan rakyat, akibatnya timbul kebencian terhadap para raja dan beralih kepada kepemimpinan yang ditawarkan Islam sebagai agama baru yang masuk ke wilayah Angkola.

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu untuk dikaji secara teoritis. Teori mempunyai peranan penting dalam hal melakukan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kajian pustaka, peneliti dapat menjustifikasi adanya masalah penelitian dan mengidentifikasi arah penelitian. Justifikasi masalah penelitian berarti peneliti menggunakan kepustakaan untuk menunjukkan pentingnya permasalahan penelitian untuk diteliti. Sedangkan mengidentifikasi arah penelitian berarti peneliti menelaah atau mengkaji

kepustakaan dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang layak dan berhubungan serta memiliki kecenderungan potensial yang perlu diuji dalam penelitian. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat Weber mengenai konsep kepemimpinan oleh Weber mengenai konsep kepemimpinan. Menurut Weber ada tiga tipe kepemimpinan umat manusia; yaitu tradisional, rasional-legal, dan kharismatik. (Soekanto, 2010:243).

Kepemimpinan tradisional menurut Weber adalah orde sosial yang bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan kuno dengan mana status dan hak-hak pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat dan kebiasaan. Dalam masyarakat tradisional kepemimpinan formal ada pada raja, bangsawan dan golongan aristokrasi pada umumnya. Golongan ini lazim disebut sebagai kelas memerintah atau elite politik (Kartodirdjo, 1982:226). Berbeda dengan tipe rasional-legal dimana semua wewenang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum di sini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat (Soekanto, 2010:245). Untuk memahami proses timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan atau silih bergantinya kelas memerintah salah satunya disebabkan kepemimpinan dengan kekuasaan kharismatik. Kharisma yang murni adalah kharisma pribadi yang dimiliki oleh pemimpin wajar sedangkan kharisma yang rutin adalah kharisma yang diperoleh pemimpin dalam menduduki jabatan tertentu atau yang diwariskan melalui garis keturunan tertentu. (Kartodirdjo, 1982:226).

Dari uraian penjelasan tipologi Weber tersebut dapat disimpulkan, pada dasarnya kepemimpinan adalah membicarakan hubungan antara penguasa dengan rakyat atau kelompok. Soekanto (1990:318) menjelaskan kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pimpinan atau leader) untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pimpinan tersebut. Lebih jauh Soekanto (1990: 319) menjelaskan bahwa kepemimpinan ada yang bersifat resmi (*formal leadership*) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, sementara kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) adalah kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan.

Dari pendapat tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa, kepemimpinan resmi merupakan kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan kemampuan seseorang yang diperoleh berdasarkan tata aturan dalam memperoleh suatu jabatan, sedangkan kepemimpinan tidak resmi didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat sehingga ukuran besar tidaknya kepemimpinan diukur berdasarkan untung dan rugi bagi komunitasnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data yang ilmiah maka dilakukan penyusunan suatu metode maupun cara agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena atau realitas kehidupan manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan yakni metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni: Heuristik, Kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan yakni berupa catatan-catatan tentang kerajaan Marancar dan buku-buku adat *dalihan natolu*. Karena keterbatasan sumber dalam memperoleh data maka peneliti menggunakan metode sejarah lisan yakni dengan mewawancarai sejumlah tokoh yang dianggap mengetahui sejarah kepemimpinan di Marancar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Kerajaan Luat Marancar

Secara geografis wilayah kerajaan Luat Marancar meliputi sepanjang Aliran Sungai Batang Toru hingga ke pinggiran pantai Samudera Hindia. Zulfikar (2006:2) berdasarkan data KeKuriaan Marancar serta data yang dihimpun dari penjelasan para penghulu Marancar yang dituturkan secara turun temurun, adalah sebagai berikut:

- ❖ Era Raja Tinamboran Sampai Raja Lobi
Sebelah Timur: Adian Rindang, sampai Dolok Sibual-Buali
Sebelah Barat: Sangkunar, Batu Mundom (pantai barat Sumatera)
Sebelah Utara: Dari Tapian Nauli Sampai ke Sibulan-bulan dan lobu Aek Puli
Sebelah Selatan: Hulu batang Ayumi, sampai ke Batang Angkola dan Aek Tombakhaya
- ❖ Era Raja Kali
Botoel sampai dengan Raja Soetan Barumun II
Sebelah Timur: Adian Rindang, sampai Dolok Sibual-Buali
Sebelah Barat: Sigala-gala, Sangkunar, Batu Mundom (pantai barat Sumatera)
Sebelah Utara: Hulu Aek Batang Toru sampai ke Sibulan-bulan dan lobu Aek Puli
Sebelah Selatan: Hulu batang Ayumi, Dolok Lubuk Raya, Sisoma Jae, Sidahanon.

2. Kepemimpinan Tradisional di Luat Marancar Sebelum Masuknya Belanda.

Pada zaman dahulu, di Marancar terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang biasa disebut “huta” (kampung). Setiap “huta”, dipimpin oleh seorang raja yang menyelenggarakan pemerintahan bersama dengan tokoh-tokoh “namora natoras”, biasanya terdiri dari “kepala-Kepala Ripe”, yaitu pimpinan kelompok-kelompok penduduk yang mendiami sebuah “huta” dan juga tokoh-tokoh adat serta orang-orang yang dituangkan. Kelompok masyarakat yang dinamakan “Ripe” biasanya terdiri dari orang-orang

yang satu marga. Dalam setiap “huta” biasanya bertempat tinggal penduduk yang terdiri dari beberapa marga dan yang menjadi raja adalah marga yang membuka kampung.

Pemimpin tertinggi di Kerajaan Marancar di sebut *Raja Panusunan Bulung*. Raja Panusunan Bulung adalah *primus inter pares*, yang terutama di antara yang utama. Raja Panusunan Bulung dipilih di kalangan *Raja Pamusuk*. Raja Panusunan Bulung sebagai pemimpin tertinggi memimpin federasi beberapa *huta*. Raja Panusunan Bulung dipilih oleh para *Raja Pamusuk* yang dilaksanakan melalui sidang adat. Selanjutnya di bawah *Raja Panusunan Bulung* yaitu *Raja Pamusuk*, yakni raja yang diangkat oleh Raja Panusunan Bulung sebagai pemimpin tertinggi kerajaan, berdasarkan marga yang pertama sekali membuka wilayah perkampungan atau yang di sebut *huta*.

Selanjutnya dalam menjalankan roda pemerintahan dalam setiap *huta* yang ada di kerajaan Marancar, setiap *huta* memiliki fungsionaris yang berasaskan konsep *Dalihan Natolu* yang terdiri dari 24 fungsionaris yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Para fungsionaris itu menjalankan tugas secara kolegal sesuai dengan aturan yang telah digariskan bersama dalam rapat-rapat adat di bawah pimpinan *Raja Panusunan*. Para fungsionaris pemerintahan *huta* dibagi dalam dua komposisi, yaitu berdasarkan pelapisan sosial dan berdasarkan jabatan

3. Sistem Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.

Cengkraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya “perjanjian tembaga”. Perjanjian tersebut berisi permintaan bantuan raja Gedombang dari Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Dengan adanya perjanjian tersebut, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Utara. Selain itu, Belanda juga menyerang dan menduduki Pulau Nias pada tahun 1863. (Meuraxa, 1973:120). Sejak tahun 1906, pemerintahan Belanda di Tanah Batak lantas dipisahkan dari Sumatera Barat dan sepenuhnya dibentuk keresidenan yang berdiri sendiri dengan Residen yang berkedudukan di Sibolga. Dengan keputusan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia langsung mengendalikan pemerintahannya dari pusat ke seluruh Tanah Batak yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa mulai membuat struktur pemerintahan baru versi Belanda di wilayah Tanah Batak yang kemudian berganti nama menjadi Tapanuli. Dalam menjalankan politik kolonialismenya Belanda, mengubah sistem pemerintahan yang ada, dengan menciptakan sistem pemerintahan kolonial ala Eropa

4. Sistem Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah berhasil memukul mundur dan memaksa pasukan kolonial Belanda menyerah, pasukan Jepang terus masuk menduduki hampir seluruh daerah Nusantara yang dianggap penting. Sumatera menjadi daerah yang sangat penting bagi pasukan Jepang sebagai satu gugusan dengan semenanjung Malaya yang telah terlebih dahulu diduduki pasukan Jepang. Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang sangat dibenci rakyat Nusantara, kedatangan pasukan dianggap sebagai simbol pembebasan terhadap penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Di setiap penjara atau dimanapun ketika mereka berhasil menangkap hidup-hidup prajurit kolonial Belanda, mereka (pasukan Jepang) menyiksa dan mempermalukannya di depan rakyat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kolonial Belanda adalah musuh yang harus diberantas.

Kahin (1995:227) Pasukan Jepang memberi suntikan propaganda anti-Barat dalam dosis lama kepada rakyat, yang membuat rakyat selama pendudukan Jepang membenci Belanda. Tak terlewatkan propaganda juga dilakukan pasukan Jepang kepada rakyat di Tapanuli untuk membenci kaki-tangan Belanda dan segala sesuatu yang terkait dengan Belanda dan Sekutu. Masuknya pemerintahan Jepang ke Indonesia, secara umum banyak membawa perubahan yang signifikan bagi sistem pemerintahan tradisional di Indonesia.

Pada masa pendudukan kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi menjadi tiga komando, yaitu:

1. Sumatera di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XXV di Bukittinggi;
2. Jawa dan Madura di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XVI di Jakarta;
3. Daerah lain di bawah Komando Panglima Angkatan Laut di Makassar.

Selanjutnya, pola pemerintahan pada masa setelah tahun 1943, kekuasaan sentralistis dipulihkan kembali, dengan kekuasaan berada pada Gubernur Jenderal atau disebut dengan Saikosikikan. Aturan-aturan selanjutnya tentang pemerintahan daerahpun bikinan kolonial Belanda, dibuat sedemikian rupa sehingga daerah provinsi dan kabupaten hanyalah sebagai boneka-boneka yang taat pada keinginan pemerintahan kolonial Jepang atau Pemerintah Bala Tentara Jepang (Kahin, 1978:38). Pemerintahan kolonial Jepang sepertinya tidak ingin mengambil resiko lebih besar dengan memberikan kekuasaan dan kewenangan pada kaum pribumi mengatur urusan di daerah masing-masing. Artinya pola pemerintahan lokal Indonesia di masa penjajahan kolonial Jepang pun tidak jauh dari nuansa sentralistis.

Kekuasaan raja-raja dijamin oleh Jepang, namun penghasilan raja "digencet" terus. Hasil tanahnya dicabut (Merdeka, :1946:3). Mereka (raja-raja) mengabdikan kepada Jepang seperti mengabdikan kepada Belanda dulu (Kahin, 1995:225).

Pasukan Jepang tetap mempertahankan kepemimpinan para raja Tapanuli dengan tujuan memudahkan pasukan Jepang dalam memobilisasi rakyat. Perintah-perintah pasukan Jepang kepada rakyat Tapanuli disampaikan melalui para raja. Lukas (1989:37) Raja-raja Tapanuli tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti segala perintah dari pasukan Jepang. Namun perintah-perintah pasukan Jepang tersebut dirasa sangat memberatkan rakyat. Kebijakan politik Jepang ini memperlebar jurang perbedaan antara rakyat dan para pemimpinnya, dan menimbulkan rasa dendam yang meledak sejak Agustus 1945. Rakyat sudah bermaksud akan mengambil tindakan. Namun batal karena rupanya Jepang juga menganut imperialisme yang serupa saja dengan Belanda. (Merdeka, 1946:3).

Ternyata pemerintahan Jepang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Kolonial Belanda kewajiban paksa menyetorkan padi kepada penguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas di antara sekian banyak kebijaksanaan politik Jepang di masa itu (Lukas, 1989:41). Hal ini disebabkan lahan pertanian di Tapanuli yang sedikit karena telah digunakan menjadi perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok beras rakyat Tapanuli sendiri mengalami kekurangan. Ditambah lagi beras yang ada harus juga dibagikan secara merata kepada para kuli kontrak perkebunan. Akhirnya banyak rakyat mengalami kelaparan, bahkan tidak sedikit yang mati kelaparan.

Situasi semakin bergolak ketika pasukan Jepang melakukan tindakan ketidakadilan secara nyata terhadap rakyat. Pemerintahan Jepang mengutamakan distribusi beras antara lain untuk kepentingan "semi militer" yaitu pendukung-pendukung pentingnya antara lain pengawai pangreh praja. Sebagian besar elite yang mendukung Jepang dan dianggap penting. Sedangkan pribumi dianggap golongan yang tidak berarti. Hal ini jelas semakin meningkatkan rasa kebencian rakyat terhadap para raja dan bangsawan. Pasukan Jepang juga menerapkan kebijakan penjajahan bahan pakaian kepada rakyat Angkola. Akibatnya banyak rakyat kesulitan mendapatkan bahan pakaian. Untuk mengatasi hal itu rakyat menggunakan bahan-bahan sederhana sebagai bahan penutup tubuh seperti goni beras yang sudah buruk. Beberapa anak gadis dijadikan *jugun iyanfu* (budak pemuas nafsu) para prajurit Jepang secara paksa. Bagi para laki-laki yang sehat diwajibkan kerja paksa *romusha* membangun segala sesuatu yang membantu suksesnya pasukan Jepang mendapatkan kemenangan perang Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa membangun jalan raya, rel kereta api, kilang minyak bumi, menanam padi, jagung dan ubi untuk keperluan perang.

Bagi mereka yang melawan pasukan pada saat diperintahkan kerja paksa akan dibunuh pasukan Jepang. Bagi mereka yang menuruti melakukan kerja paksa tidak terlepas dari bahaya kematian. Mereka dipaksa kerja siang dan malam tanpa diperhatikan

kehatan maupun makanannya. Bahkan sering kali rakyat bekerja dalam tekanan siksaan pasukan Jepang atau dalam keadaan lapar hingga menuju kematian. Hadirnya Jepang sebagai penguasa baru yang alergi terhadap pemerintahan Belanda sebelumnya mengganti struktur pemerintahan di Kerajaan Marancar. Kepala Kuria bentukan Belanda di ganti dengan Huku Kuco yang fungsinya sama-sama untuk mengontrol rakyat agar tetap loyal terhadap pemerintah, hanya saja Kepala Kuria pada masa Belanda tertumpu pada upaya mengurus kekayaan alam untuk mengisi kas Kerajaan Belanda dengan memaksa rakyat Tanam Paksa, sedangkan Huku Kuco sebagai pimpinan tertinggi kerajaan masa Jepang, bertugas untuk mengurus harta benda rakyat untuk kepentingan perang Jepang, serta mengumpulkan para pemuda untuk di jadikan pasukan perang Jepang. Sedangkan Hulubalang, pasukan kerajaan yang melindungi Kepala Kuria diganti dengan Keibi yakni kepala Polisi, keibi merupakan militer Jepang yang bertugas membantu Huku Kuco dan Kuco untuk memungut pajak dari rakyat dan mengawasi Romusha. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan perubahan pemerintahan tradisional di Kerajaan Marancar dari masa Belanda ke Jepang mengalami perubahan sesuai dengan tujuan masing-masing penguasa.

5. Dampak penjajahan Belanda dan Jepang terhadap Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Angkola di Kerajaan Luat Marancar

Perubahan tata pemerintahan tradisional itu terjadi secara drastis sebagai akibat perang paderi yang menyebabkan kehadiran pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini. Perubahan demi perubahan terjadi terus-menerus sampai pada masa pendudukan Jepang, kemudian masa kemerdekaan. Dengan adanya perubahan itu, maka ciri-ciri pemerintahan tradisional pun lambat-laun hilang sehingga yang tinggal adalah adat istiadat yang mengatur tata perilaku pergaulan masyarakat setempat. Ketika Belanda menguasai Sumatera Barat dan Tapanuli dalam perang Paderi, maka Tapanuli dimasukkan menjadi salah satu keresidenan Sumatera Westkust yang beribu kota Sibolga. Tapanuli Selatan diperintah oleh Asisten Residen Mandailing-Angkola. Asisten Residen pertama adalah T.J. Willer, bekas kontrolir Padang Lawas pada masa perang paderi yang kemudian diberhentikan atas desakan yang dipertuan Hutasiantar kepada Gubernur Sumatera Westkust Jenderal Michiels.

T.J Willer kemudian diganti oleh Alexander Philipus Godon selama 10 tahun, 1847-1856. Dia adalah seorang ahli pembangunan jalan yang membangun jalan ekonomi ke Natal bersama yang dipertuan Hutasiantar dan mengembangkan desa terpadu dengan mencetak sawah yang luas, pertanian rakyat dan penataan Desa. Tokoh ini adalah sahabat karib Douwes Dekker alias Multatuli, Kontrolir Natal, yang menulis karya sastra *Max Hevelar*. Dalam perkembangan berikutnya pemerintahan kolonial

Belanda menyempurnakan Administrasi pemerintahannya dengan membentuk *Afdelling* Padangsidimpuan yang dikepalai oleh Asisten Residen Belanda. *Afdelling* ini kemudian dibagi menjadi tiga *OnderAfdeling* yang di kepalai masing-masing oleh *Controleur* Belanda. Tiap *OnderAfdeling* dibagi lagi menjadi beberapa *Onderdistrict* yang masing-masing dikepalai oleh Asisten Demang Pribumi. Seterusnya *Onderdistrict* dibagi-bagi menjadi *Luat* yang dikepalai oleh Kepala Luat untuk wilayah Padang Lawas dan oleh Kepala Kuria di Angkola, Sipirok dan Mandailing. Tiap *Luat* dibagi lagi menjadi sejumlah kampung yang di kepalai Kepala Kampung yang dibantu oleh Kepala Ripe. Untuk menjalankan pemerintahan dan ketertiban umum pemerintah kolonial membentuk kepolisian yang membantu *Magistrat* pada tiap-tiap *Onderdistrict*.

Ditingkat KeKuriaan atau Luat ada petugas yang memelihara ketertiban dan keamanan yang dipegang oleh hulubalang. Demikianlah roda pemerintahan kolonial dijalankan di bona bulu dengan pengawasan yang ketat dari tingkat yang paling tinggi berjenjang terus ketingkat yang paling bawah. Sebelum kehadiran pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan tradisional tertinggi dikepalai oleh Raja Panusunan yang membawahi beberapa kampung yang di pimpin oleh Raja Pamusuk.

Seperti telah disinggung bagian lain, Raja Panusunan dibantu oleh seorang wakil yang disebut raja pangundian, yaitu seorang raja yang cerdik cendikia dari salah satu kampung di wilayah kekuasaan raja panusunan. Sekalipun pemerintahan dipegang oleh kelompok keluarga tertentu, namun dijalankan secara demokratis. Seluruh lapisan masyarakat memiliki wakil-wakilnya didalam dewan hatobangon sehingga segala masalah masyarakat kampung dapat dibicarakan bersama. Namun demikian, raja tetap mempunyai hak prerogatif untuk mengambil keputusan yang penting. Raja sebagai kepala pemerintahan tradisional sekaligus memegang jabatan sebagai raja adat. Perubahan administrasi pemerintahan tradisional terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Dalam melakukan perubahan ini Belanda mengesampingkan tradisi yang telah berlaku turun-temurun. Ada Raja Panusunan Bulung yang diangkat menjadi kepala Kuria atau bahkan turun menjadi raja pamusuk, dan sebaliknya, ada Raja Pamusuk menjadi kepala Kuria.

Dampak perubahan sistem pemerintahan buatan Belanda bagi Kerajaan Luat Marancar, secara umum menyebabkan rusaknya tatanan adat *Dalihan Natolu* yang telah turun-temurun. Nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat adat berubah menjadi masyarakat yang berjiwa modernis sehingga banyak nilai-nilai adat yang sudah hilang. Selain itu dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sistem pemerintahan tradisional di Kekuriaan Marancar, menimbulkan perlawanan rakyat terhadap para Raja yang sebelumnya sangat harmonis. Sehingga rakyat

sangat membenci Raja karena dianggap sebagai kaki tangan penjajah dan menyengsarakan rakyat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dibuat suatu kesimpulan tentang sejarah kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar yaitu:

1. Sistem pemerintahan tradisional di Marancar, merupakan sistem pemerintahan yang demokratis atau berdasarkan pada musyawarah mufakat. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di masyarakat Tapanuli Selatan, dalam menjalankan fungsinya tetap bersama-sama dengan raja "Huta" lainnya.
2. Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Bataklanden, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan. Penguasaan Belanda atas Tapanuli membawa perubahan besar bagi kerajaan Luat Marancar, fungsi raja yang sebelumnya mengayomi rakyatnya berubah menjadi kaki tangan Belanda dalam menjalankan pemerintahannya.
3. Sedangkan setelah masuknya Jepang di Tapanuli, istilah Resident peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh Jepang diganti menjadi Cokan; Asistent Resident yang memimpin Afdeeling diganti menjadi Gunseibu; Controleur yang mengepalai Onder Afdeeling dihilangkan tetapi posisi Demang yang sebelumnya memimpin District ditingkatkan untuk memimpin onder Afdeeling yang disebut Gunco; Asisten Demang yang mengepalai Onder district diganti menjadi Huku Gunco; Kepala Kampung diganti menjadi Kuco, sedangkan Kepala Polisi disebut Keibi.
4. Sementara itu dampak dari sistem pemerintahan buatan Belanda dan Jepang bagi masyarakat yang ada di Kerajaan Luat Marancar yakni timbulnya kebencian rakyat terhadap pada Raja yang sebelumnya sangat harmonis dan menjunjung tinggi adat *Dalihan Natolu*. Nilai-nilai budaya *Dalihan Natolu*, sebagai asas pemerintahan raja dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lagi dipakai sehingga kepercayaan rakyat terhadap para Raja sudah sirna. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan perubahan tersebut adalah masyarakat di Kerajaan Luat Marancar lebih memilih sistem pemerintahan yang berdasarkan aqidah Islam, sebab raja dan konsep *Dalihan Natolunya* dianggap sebagai kaki tangan para penguasa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dada Meuraxa.1973. *Sejarah Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Sumatera Utara*. Medan: Sasterawan.
- Kahin, G. M. T. Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia, Solo : Sebelas Maret University Press., 1995.
- Lucas, A. E. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi, Jakarta : PT Pustaka, 1989.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- . 1992. *Pengantar Antropologi Jilid I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- . 1997. *Pengantar Antropologi Pokok-pokok etnografi II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- . 2009. *Pengantar Ilmu antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Reid, Anthoni, *Menuju Sejarah Sumatera*, Jakarta: Pustaka Obor, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Simanjuntak BA. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1969.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- . *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.